BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menunutut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyeleggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP Tahun 2022 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Karanganyar mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Karanganyar . Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanganyar berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada. Untuk itu, maka ditetapkannya Rencana Strategis SKPD Kecamatan Karanganyar yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Teknis Program dan Kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Karanganyar .

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

1.3. Gambaran Umum

SKPD Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Karanganyar memiliki luas ± 5.775 hektar dari 7(tujuh belas) dan 4 (empat Kelurahan) dengan jumlah penduduk seluruhnya ± 54.440 jiwa (sumber : data KDA 2014). Dengan kondisi alam dan SDM yang demikian, maka Kecamatan Karanganyar memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, industri rumah tangga.

Secara Administrasi Kecamatan Karanganyar termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah Timur Laut Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Karanggayam
Sebelah Timur : Kecamatan Sruweng
Sebelah Selatan : Kecamatan Adimulyo
Sebelah Barat : Kecamatan Gombong

- Dalam menjalankan tugas-tugas Aparatur Kecamatan Karanganyar melaksanakan fungsi- fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 4 Kasi, 2 Kasubag, 6 Staf dan 3 Staf THL, juga berkonsultasi dengan SKPD-SKPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Karanganyar, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti DIKPORA, UPTD Distanak, UPTD UPT BPPKB, UPTD DPU, UPT Puskesmas, SMP Negeri Karanganyar dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Pembentukan SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
    1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
    2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
    3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
    5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
    6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
    8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar

Tugas Pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

a. Pembinaan Pembinaan Administrasi Desa;
b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;

d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
g. Melaksanakan Musrenbangcam;
h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
j. Mengkoordinasikan Raskin;
k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

3. Peran SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Karanganyar
   a. Kelembagaan

      Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

      Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Karanganyar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dana Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanganyar juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

      Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karanganyar masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

   b. Tata Kerja Kecamatan Karanganyar

      Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

1.4. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Karanganyar sampai akhir bulan Desember 2022 sejumlah 16 (empat belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

Tabel 1.4.1. Karyawan Kecamatan Karanganyar berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/a	2	

2	III/a	1	
3	III/b	6	
4	III/c	1	
5	III/d	4	
6	II/c	1	
7	II/d	3	

2) Berdasarkan Ijasah

Tabel 1.4.2. Karyawan Kecamatan Karanganyar berdasarkan Ijazah Terakhir

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	6	
4	Sarjana Muda	-	
5	Sarjana	6	
6	Pasca Sarjana	2	

Sumber daya manusia di Kecamatan Karanganyar masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2022 pada SKPD Kecamatan Karanganyar sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

1. Camat

   Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

   1.1. Fungsi

   Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat Karanganyar mempunyai fungsi:

   a. Pengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan social masyarakat;
h. Pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, agrarian dan kependudukan;
j. Pelalaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan partisipasi masyarakat;
k. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. Pengordinasian penyelenggraan tugas instansi pemerintah ainnya yang berada di wilayahnya;
m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuptugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakanpemerintah Desa atau kelurahan;
n. Pelaksanaan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendKaranganyar, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan admnistrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
e. Penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas seksi;
f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinnya.

Sekretariat membawai dua sub bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintah dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuankerja perangkat daerah dan instansidi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
i. Pelapran penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
j. Penyusunan program,penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan,pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasipemerintah desadan / atau kelurahan;
l. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau kelurahan beserta perangkat desa dan / atau kelurahan;
m. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

   Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

   Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

   a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
   b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
   c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
   d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
   e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
   g. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian,peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
   h. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
   i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
   j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

   Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

   Untuk melaksanakan tugsnya, Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesejahteraan social;
   b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksannaan kegiatan pembinaan kesejahteraan social, pelayanan dan bantuan sosial,peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan dan olah raga dan kesehatan;
   c. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang social budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
   d. Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
   e. Pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan social di wilayah kerjanya; dan
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Karanganyar.

Bagian 1.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN

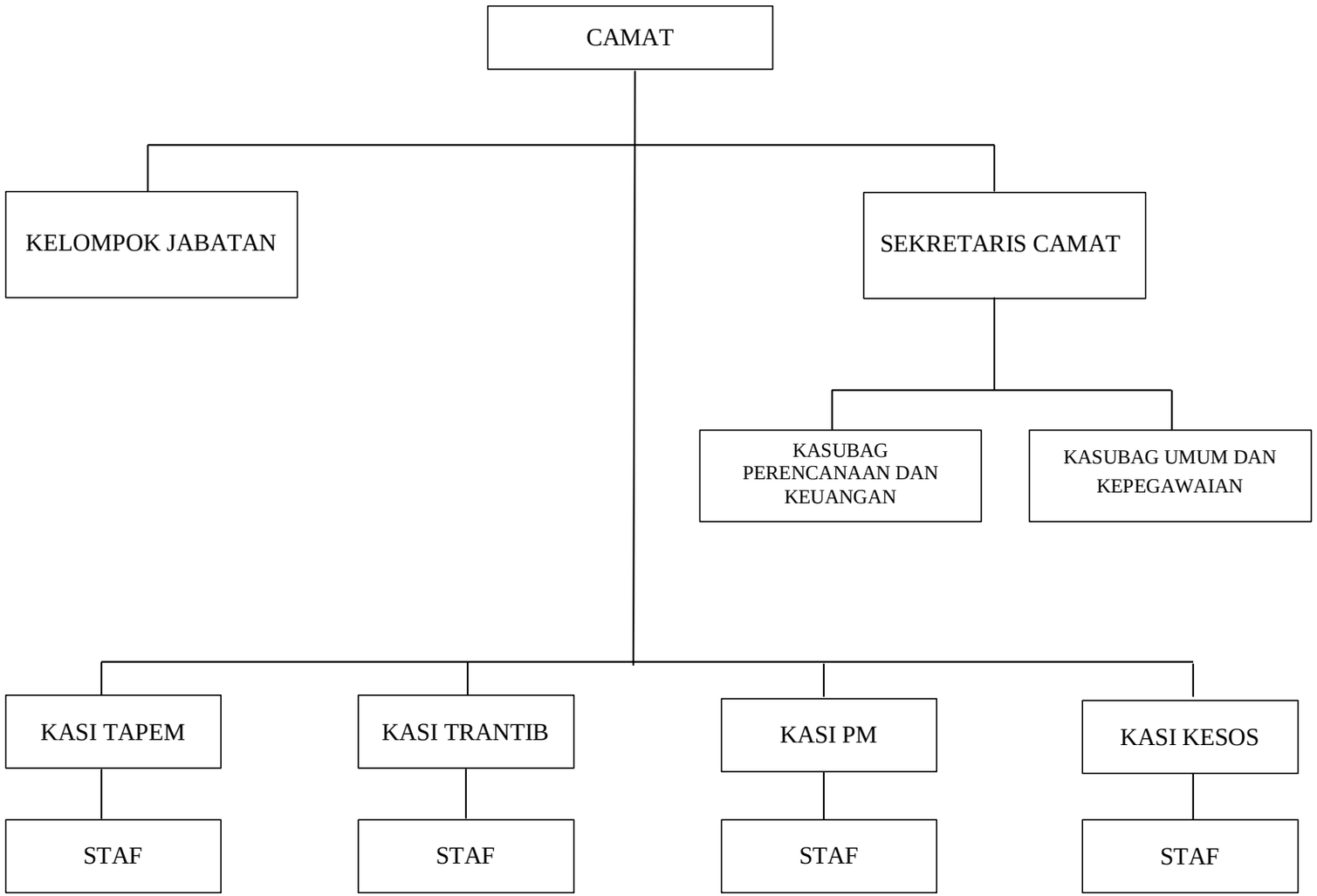

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 + Desa	17
3.	Komputer yang dapat digunakan	7
4.	Laptop yang dapat digunakan	8
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	2
6.	Printer yang dapat digunakan	8

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun mengikuti pola /sistimatika sebagai berikut ;

Kata Pengantar

i. Halaman Judul
ii. Kata Pengantar
iii. Daftar Isi
iv. Daftar Tabel
v. Daftar Bagan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum
- 1.4. Susunan Kepegawaian
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencana Strategis
    1. Rencana Strategis (Renstra)
    2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
- 4.2. Permasalahan/ Kendala
- 4.3. Stategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Lain-lainnya yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana stratejik SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja Tahun 2022.

Visi dan Misi SKPD Kecamatan Karanganyar

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi :

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah **"*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, Dan Berkelanjutan*".**

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, serta berkemajuan melaui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan social masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah).
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (*good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1. **Rencana Strategis (Renstra)**

   Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. Rencana Strategis Kecamatan
Karanganyar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET AKHIR (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	1. Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional. 2. Mengurangi angka kemiskinan	1. Terkirimnya delegasi kecamatan dalam rangka kegiatan hari jadi kebumen dan hari besar keagamaan. 2. Terselenggaranya koordinasi TKP2K Des tingkat Kecamatan.	Kegiatan Kegiatan	3 1	18 6
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, teransparan, akuntabel dan partisipatif.	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.	1. Tercukupinya jasa surat menyurat. 2. Tercukupinya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik 3. Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 5. Tercukupinya jasa administrasi keuangan. 6. Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor. 7. Terpeliharanya peraltan kerja dengan baik. 8. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. 9. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. 10. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor. 11. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan. 12. Tersedinaya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu. 13. Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan Bulan	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

			14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. 15. Tercukupinya sarana kerja kantor 16. Terpeliharanya rumah dinas camat. 17. Terpeliharanya gedung kantor.	 Unit Unit Unit	 6 1 3	 36 6 3
3	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat.	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD kecamatan dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	desa	12	72
4.	Memberikan pembinaan terhadap pemerintah desa, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.	Terbinanya aparatur pemerintah desa.	Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa	desa	12	72
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat , berperan aktif dalam pembangunan.	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Menyusun pedoman , proses dan mekanisme perencanaan pembangunan.	kegiatan	2	12

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.
   Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan,dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
   1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
   2) Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
   3) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
   4) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kecamatan dan Desa;
   5) Meningkatnya partisipasi masyarakat;
   6) Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
   1) Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

b. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Karanganyar, antara lain :
   1) Penambahan tenaga dengan meminta ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen
   2) Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.
   3) Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa

c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Karanganyar diataranya adalah dengan :
   1) Meningkatkan service sarana prasarana kantor
   2) Mengadakan sarana dan parasarana kantor yang baru.

d. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat,transparan dan Mudah bagi masyarakat.dengan cara :
   1) Meningkatkan disiplin pegawai
   2) Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai

e. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Karanganyar yaitu dengan cara :
   1) Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip
   2) Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Tahun 2022 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 13 (tiga belas) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2.1. Tabel Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanganyar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Presentasi Penyediaan Surat menyurat	Tercapainya sarana pelayanan administrasi perkantoran .	100%	25 %	25%	25%	25%
2	Prosentase Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya ,air dan Listrik.	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air, dan Listrik.	100%	-	-	-	100%
3	Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan .	Tersedianya jasa pemerliharaan Pajak dan perizinan kendaraan dinas /operasional atau lapangan	100%	25 %	25%	25%	25%
4	Prosentase Penyediaan jasa administrasi keuangan tugas ASN	Tersedianyas jasa administrasi keuangan tugas ASN	100%	25 %	50%	25%	0

5	Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	25 %	25%	25%	25%
	Prosentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor .	Tersedianya bahan logistic Kantor	100%	25 %	25%	25%	25%
	Prosentase Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	25 %	25%	25%	25%
	Prosentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .	100%	25 %	25%	25%	25%
	Prosentase Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.	Tersedianya Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.	100%	0	50%	50%	0
	Prosentase Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Terpeliharannya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	100%	15 %	25%	15%	6%
	Prosentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	100%	60 %			

	Prosentase Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Pengadaan Meubelair	100%	25 %	25%	25%	25%
	Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan Material	100%	25 %	25%	25%	25%
	Prosentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	0	25%	25%	50%
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan dan ASN yang mendapatkan tambahan penghasilan	100%	25 %	25%	25%	25%
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	Terdokumentasinya Perencanaan , Rentra, Renja, LKJIP,LKPJ, RKA, DPA,RKAP, DPPA	100%	25 %	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terfasilitasinya jumlah orang pengelola Administrasi Keuangan.	100%	25 %	25%	25%	25%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelayanan Administarsi perkantoran/program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	100%	25 %	25%	25%	25%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Tersedianya progam sarana dan prasarana Aparatur .	100%	-	100%	-	
3	Pengembangan Data Informasi /Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Terselengaranya Program Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi .	100%	25 %	25%	25%	25%
4	Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah /Evaluasi Kinerja .	Terselengaranya Program Penyusunan dan Pengumpulan Data	100%	-	50 %-	25%	25%
5	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Terselenggaranya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan .	100%	25 %	25%	25%	25%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa/Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.	Terselggaranya Program Peningkatan Partisipatif Masyarakat dalam membangun Desa.	100%	25 %	25%	25%	25%

	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	Terselenggaranya Program Pengembangan wawasan Kebangsaan .	100%	25 %	75%		
	Peningkatan Peran Perempuan di pededesaan /fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Terselemnggaranya Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan.	100%	25 %	25%	30%	20 %
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Terselngaranya program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	100%	25 %	25%	25%	25%
	Peningkatan Perencanaan pembangunan Daerah/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan daerah Pembanguna Desa.	Tereselenggaranya Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah .	100%		25%	50%	25%
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah/Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan dengan Akuntabel .	100%	25 %	25%	25%	25%

	Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .	100%	50 %	25%	20%	5%
	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Program Sarana dan Prasarana Aparatur.	100%	48	48	48	48
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah .	24 Unit 7 unit 1 unit	0 0 0	24 7 1	0 0 0	0 0 0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Terpenuhinya Pelayanan Jasa Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,jasa Komunikasi ,SDA dan Pelayanan Umum.	100%	25 %	25%	25%	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Terpenuhinya Pemeliharaan barang penunjang urusan Pemerintahan Daerah.	100%	25 %	25%	45%	0 %
	Pengembangan Data/Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	25 %	25%	58%	0 %

	Pengembangan /Informasi /Startistic Daerah/Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	Terselenggaranya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan .	100 %	25 %	25%	30%	20 %
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan /Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.	Terselenggaranya Program Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah					
	Fasilitasi dan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa)	Terfasilitasinya dan direkomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan)	100%	25 %	25%	25%	25%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa .	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	100%	25 %	25%	25%	25%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	100%	25 %	30%	30%	15%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan Partisipatif	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembanguna Partisipatif.	100%	25 %	25%	25%	25%

	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Terfasilitasinya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	25 %	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik.)	Terlaksananya Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	100%	25 %	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan nonusaha	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha .	100%	25 %	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan.	100%	25 %	25%	25%	25%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	Tersusunnya Dokumen Data Base dan Profil LKPJ, LPPD	100%		30%	30%	40%
	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Perangkat daerah yang disusun.	100%	25 %	25%	25%	25%

	Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Terlaksananya Kegiatan : - UKS - Sosial Masyarakat - PKK	100%	25 %	25%	25%	25%
	Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pelaksanaan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara RI.	Kegiatan dalam Rangka HUT RI (Paskibraka, Carnaval, Resepsi, HUT RI)	100%			100%	
	Penyelenggaraan Musrenbangcam/fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif .	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kewilayahan secara Partisipatif.	100%	25 %	25%	25%	25%
	Fasilitasi Program Pembangunan/ Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.	Terlaksananya program dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh.	100%	25 %	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan	100%	25 %	25%	25%	25%
	Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi Kecamatan.	Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan Admiministrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	25 %	25%	25%	25%

	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	ASN yang mendapat gaji dan tunjangan dan ASN yang mendapatkan tambahan Pengahasilan.	100%	25 %	25%	25%	25%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah .	Terdokumentasinya Perencanaan Renstra, Renja, LKJIP, LKPJ, RKA, DPA, RKAP, DPPA	100%	25 %	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Terfasilitasinya jumlah orang pengelola Adminitrasi Keuangan.	100%	25 %	25%	25%	25%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indicator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Adapun media yang digunakan sebagai Pengukur Kinerja adalah :

- Formulir PKK (Pengukur Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukur Pencapaian Sasaran)

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

1. Capain kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis seperti terlihat pada Tabel 3.1.1. berikut:

Tabel 3.1.1. Tingkat Capaian Sasaran pada Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan administrasi perkantoran	Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A
2	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendKaranganyar	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendKaranganyar yang efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Fasilitasi dan koordinasi progrm-progrm pennggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
											-	-

2. Analisis penyebab keberhasilan

   Keberhasilan Kecamatan Karanganyar mencapai target yang sudah ditetapkan menurut indikator kinerja pada sasaran strategis dapat terlihat pada realisasinya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh segenap anggota entitas baik PNS maupun THL disamping penggunaan sumber daya secara efisien untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Kebumen. Namun demikian hal ini masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan mengingat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menuntut pelayanan yang semakin berkualitas.

3. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

   a. Sumber daya manusia

      Pada Tahun 2022 dengan 16 orang PNS dan 3 orang THL Kecamatan Karanganyar dapat melaksanakan tugas-tugas rutin dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kekurangan tentu saja ada, faktor rangkap tugas adalah salah penyebabnya mengingat keterbatasan jumlah personil. Namun demikian secara keseluruhan tidak ada masalah.

   b. Sumber daya anggaran

      Anggaran kegiatan tahun 2022 sebesar Rp. 10.678.418,000,00 terealisasi Rp. 10.014.791.447,00 atau 93,78%.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Table 3.1.2. Program/kegiatan Tahun 2022

	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupten / Kota		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 17.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tercukupinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perngkat Daerah.
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp 12.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercukupinya Kebutuhan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Tercukupinya kebutuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 48.776.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji /Verifikasi Keuangan SKPD Tercukupinya kebutuhan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor .	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 15.500.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Tercukupinya kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .
6	Penyediaan Bahan Logistik.	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 38.300.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik. Tercukupinya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik.
7	Penyediaan Barang Cetaka dan Penggandaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2021 Rp. 24.516.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan barang cetakan dan penggandaannya Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 10.216.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan Bahan/Material	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 45.500.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan Penyediaan Bahan /Material. Tercukupinya kebutuhan Penyediaan Bahan/Material.
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 3.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Tercukupinya kebutuhan Penyelnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11	Pengadaan Mebel	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 10.000.000,00 Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan Bertambahnya sarana prasarana Kantor yang memadai.

12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 11.250.000,00 Jumlah bulan yang tercukupi kebutuhan jasa surat menyurat. Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat .
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik .	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 75.390.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
14	Penyediaan Jasa Umum Kantor .	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 45.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan Penyediaan Jasa Umum Kantor Tercukupinya kebutuhan Penyediaan Jasa Umum Kantor .
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan .	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 42.770.000,00 Jumlah bulan yang tercukupi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas. Tercukupinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 13.250.000,00 Jumlah bulan yang tercukupi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya. Tercukupinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 57.983.000,00 Jumlah bulan yang tercukupi Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya. Tercukupinya Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penyelanggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik.		
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Inputs Outputs Outcoes	APBD 2022 Rp. 58.000.000,00 Jumlah bulan yang tercukupi kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan. Tercukupinya kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan .

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN .		
19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp.72.400.000,00 Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan . Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musywarah .
20	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp.3.046.722.000,00 Terciptanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan . Terciptanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan .
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 641.206.000,00 Terciptanya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan . Terciptanya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan .
22	Evaluasi Kelurahan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 17.000.000,00 Terciptanya Evaluasi Kelurahan . Terciptanya Evaluasi Kelurahan .
	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum.		
23	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahankan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 13.000.000,00 Terciptanya Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional . Terciptanya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa .		

24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	Inputs Outputs Outcomes	APBD202 Rp. 32.000.000,00 Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra, Renja dan RKA/DPA) Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra,Renjadan RKA/DPA)
25	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 5.000.000,00 Jumlah dokumen database/profil desa yang tersusun Tersusunnya dokumen database/profil Desa
26	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 18.000.000,00 Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tersusunnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
27	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 17.000.000,00 Jumlah Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tersusunnya Penyusunan Pembangunan perencaan partisipatif
28	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa .	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp.20.000.000,00 Jumlah fasilitas Penyusunan program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tersusunnya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
29	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya .	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2022 Rp. 5.000.000,00 Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya . Tersusunnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya .

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.2.1. Realisasi APBD Tahun 2022

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	KET
1	2	3	4	5
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	17.000.000,00	4.997.800,00	99,19	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	12.000.000,00	5.995.100,00	99,84	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan	39.069.000,00	33.619.190,00	86,05	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.500.000,00	15.422.900,00	99,50	
Penyediaan Bahan logistik Kantor	38.300.000,00	38.300.000,00	100,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.516.000,00	24.515.400,00	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.216.000,00	10.206.000,00	99,90	
Penyediaan Bahan/Material	45.500.000,00	45.412.700,00	99,81	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	3.000.000,00	2.960.000,00	98,67	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.991.00,00	99,82	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.250.000,00	10.969.000,00	97,50	
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik.	75.000.000,00	70.499.009,00	94,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	45.000.000,00	44.998.250,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42..770.000,00	40.501.372,00	94,70	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.250.000,00	13.154.000,00	99,28	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banngunan Lainnya.	66.690.000,00	64.877.500,00	98,76	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan .	58.000.000,00	57.783.700,00	99,63	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72.400.000,00	51.569.900,00	71,23	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.087.650.000,	3.784.222.475,00	92,58	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	642.856.000,00	614.899.000,00	95,65	
Evaluasi Kelurahan	17.000.000,-	16.921.100,00	99,54	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahankan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.000.000,00	12.850.000,00	97,31	

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemeintahan Desa.				
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa	32.000.000,00	30.754.000,00	96,11	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembanguna Desa.	5.000.000,00	4.567.800,00	91,36	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.000.000,00,-	17.655.000,00	98,08	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.	17.000.000,00	15.284.000,00	89,91	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	20.000.000,00	19.999.800,00	100,00	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00,-	4.711.500,00	94,23	
JUMLAH	**10.678.418.000,00**	**10.014.791.447,00**		

Adapun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Karanganyar sampai dengan 30 Desember 2022 yang merupakan program kegiatan SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dengan target SPPT sebanyak 36.122 lembar dan terealisasi sebanyak 35.282 lembar atau 97,67% dengan target keuangan sebanyak Rp. 1.631.682.138,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.583.760.883,00 atau 97,06%.

Untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Karanganyar adalah pelayanan perekaman KTP elektronik dan KK dengan rincian sebagai berikut;

1.	Sisa Blangko KK Tahun 2021	:	2.000	lembar
	Bon Blangko KK Tahun 2022	:	0	lembar
	Jumlah	:	2.000	lembar
	Setoran Denda	:	0	lembar
	Setoran Gratis	:	0	lembar
	Rusak	:	0	lembar
	Sisa s.d Bulan Juni 2021	:	0	lembar
	Realisasi Keuangan			
	Setoran Denda KK HVS 80 Gram	:	Rp. 245.000,00	
2.	KTP Elektronik			
	Bon Blanko KTP Elektronik	:	1.050	keping
	Penggunaan Blangko e-KTP	:	1.046	keping
	Rusak	:	4	Keping
	Sisa Blangko	:	0	keping.

Sedangkan kegiatan yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Karanganyar yang merupakan kegiatan dari Dinas Sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan Jumlah 22.546. Bantuan Penerima PKH dengan jumlah KPM sebanyak 1.345 KPM. Bantuan Penerima Sembako dengan jumlah KPM sebanyak 2.167 KPM. Bantuan Penerima BLT BMM dengan jumlah KPM sebanyak 3516 KPM.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam Tahun 2022 Kecamatan Karanganyar memperoleh alokasi dana senilai Rp. 10.678.418.000,00 (total anggaran yang dikelola) target Keuangan Fisik 100% dengan rincian untuk belanja tidak langsung senilai Rp. 8.214.354.651,00 atau 83,08 % dan Belanja Langsung senilai Rp. 1.800.436.796,00 atau 17,97%. Realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 senilai Rp. 10.014.791.447,00 atau 93,78%

BAB IV
PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari uraian pengukuran kinerja sasaran pada BAB III, Secara umum Kecamatan Karanganyar sampai dengan 31 Desember 2022 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan baru mencapai 93,83% hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum selesai 100% diantaranya kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Partisipatif, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sarpras Keluarahan .

Disamping melaksanakan program kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Karanganyar juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan tugas SKPD Tingkat Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pelayanan KK dan KTP
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

4.2 Permasalahan/ Kendala

Dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tentunya mengalami permasalahan/kendala. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan karena masih dapat diatasi. Dengan kata lain bahwa permasalahan/kendala yang ada lebih bersifat tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik lagi.

Peningkatan tersebut diatas diperlukan pada beberapa aspek yaitu:

1. Aspek tata laksana
   Belum adanya fasilitasi untuk disabilitas yang membutuhkan pelayanan public.
2. Aspek sumber daya manusia
   a. Ketersediaan PNS masih kurang sehingga terjadi rangkap tugas yaitu staf pada suatu seksi merangkap sebagai staf
   b. *Soft skills* petugas pada ruang pelayanan perlu ditingkatkan untuk terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat

c. Terbatasnya jumlah SDM/ personil serta kondisi prasarana dan sarana kerja yang belum memadai sehingga petugas maupun warga yang datang secara tidak langsung merasakan ketidaknyamanan saat memerlukan penjelasan yang cukup detail/ lama, akibatnya pelayanan kepada masyarakat berdampak kurang maksimal.

3. Aspek sarana dan prasarana
   a. Slasar untuk Disabilitas/ Lansia dan Kursi Roda belum ada.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Peningkatan kinerja di masa datang dilakukan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ada. Upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Membuat slasar untuk mempermudah pelayanan untuk disabilitas maupun lansia
2. Mengusulkan penambahan jumlah PNS baik dari hasil rekruitmen, mutasi maupun reorganisasi
3. Melakukan pembekalan *soft skills* terhadap para petugas pelayanan
4. Pengadaan Kursi Roda dan Slasar Disabilitas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Tahun 2022 yang dapat kami susun dan kami laporkan semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Karanganyar, 18 Januari 2023
CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

SUIS IDAWATI , S. Sos
Pembina TK I
NIP. 19670531 198603 2 001